

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Dishubkominfo adalah dokumen perencanaan Dishubkominfo untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Dishubkominfo merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dishubkominfo yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dishubkominfo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dishubkominfo dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dishubkominfo, evaluasi pelaksanaan Renja Dishubkominfo tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dishubkominfo.

Penyusunan Renja Dishubkominfo yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Dishubkominfo;
2. Tahap Penyajian rancangan Renja Dishubkominfo.

Dalam Penyusunan Renja Dishubkominfo Kabupaten Donggala, Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dishubkominfo, sesuai dengan rencana program prioritas pada

rancangan awal RKPD. Selanjutnya di laksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk menggali Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Dishubkominfo dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Dishubkominfo Kabupaten Donggala disusun dengan :

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Dishubkominfo;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dishubkominfo yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008.

1.2.1. Kewenangan (Mandat)

Melalui Peraturan Bupati Donggala Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar pemerintah antar daerah antar sektor dan antar lintas lainnya;
5. Penetapan pentunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
6. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa;
7. Pelaksanaan SPM Daerah;
8. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antar Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

9. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
11. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Daerah;
12. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala Daerah;
13. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
14. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
15. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah;
16. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
17. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
18. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan , pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
19. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
20. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta dalam dan luar negeri skala Daerah;
21. Bimbingan supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;

23. Bimbingan Supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di kecamatan/desa;
24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah;
25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa;
26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Daerah;
27. Bimbingan supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa;
28. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
29. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa
30. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
31. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
32. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian wilayah dan rencanan kawasan tertentu;
33. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
34. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsiruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataaan ruang;
35. Penetapan kawasan strategis Daerah;
36. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
37. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;

38. Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
39. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
40. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah;
41. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
42. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Daerah;
43. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
44. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah;
45. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;
46. Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
47. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah kawasan strategis Daerah;
48. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
49. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah :
 1. a) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah skala Daerah;
 - b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
 - c) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
 2. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;

3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan;
 4. Kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
 5. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
 6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
 7. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala Daerah;
 8. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
- 50 Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;
- 51 Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Daerah;
- 52 Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah;
- 53 Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Daerah;
- 54 Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- 55 Pemberian dukungan surveisosial dan ekonomi;
- 56 Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah;
- 57 Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah;
- 58 Pelaksanaan kewenangan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

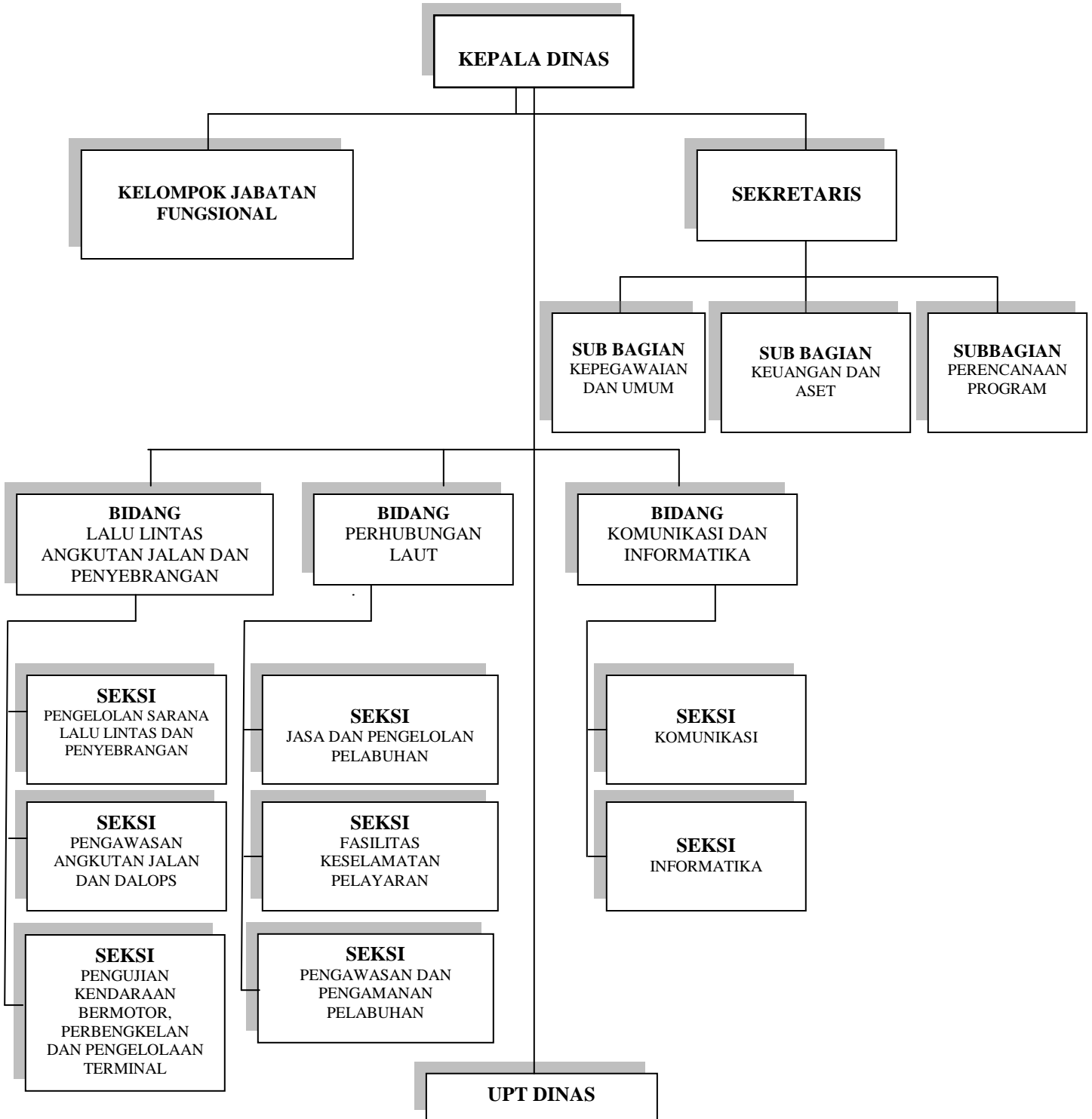
1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Didalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Yang mengatur bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan / mandat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Penyebrangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sarana Lalu Lintas dan Penyebrangan;
 2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan dan Dalops;
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perbengkelan dan Pengelolaan Terminal.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Jasa dan Pengelola Pelabuhan;
 2. Seksi Fasilitas Keselamatan Pelayaran;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Pelabuhan;
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Balai Pengujian Kendaraan Bermotor)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DONGGALA**

*Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala*



Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Donggala telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perumusan Renja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi segenap Jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika didalam mengemban tugas-tugasnya secara baik dan benar, terarah, terukur, transparan, dan akuntabel menurut peran dan fungsi serta kapasitas masing-masing dengan tujuan menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai rencana kinerja yang ditetapkan.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mensinkronkan usulan hasil Musrenbang kecamatan yang berisi program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2015 yang akan dijadikan acuan dalam Penyusunan akhir RKPD untuk dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya akan ditetapkan untuk menjadi RAPBD.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menjadi acuan dalam Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dishubkominfo berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang dari Desa dan Kecamatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dishubkominfo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dishubkominfo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dishubkominfo
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja DISHUBKOMINFO
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN LALU**

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishubkominfo tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Donggala telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Dishubkominfo untuk tahun Anggaran 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.256.856.471	2.236.253.094	20.603.377	99,09	
-	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi	320.916.471	306.923.662	13.992.809	95,64%	Perubahan, dari Rp. 185.316.471 bertambah Rp. 135.600.000
-	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1.935.940.000	1.929.329.432	6.610.568	99,66	Perubahan, dari Rp. 1.894.540.000 bertambah Rp. 41.400.000

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.500.000	97.470.000	1.030.000	98,95	
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	98.500.000	97.470.000	1.030.000	98,95	Perubahan, dari Rp. 52.500.000 bertambah Rp. 46.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	18.000.000	12.000.000	60,00	
-	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	30.000.000	18.000.000	12.000.000	60,00	Perubahan, dari Rp. 40.000.000 berkurang Rp. 10.000.000
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportasi Kepulauan antar Desa/Pulau-pulau kecil Di Daerah tertinggal	5.660.011.769	5.594.319.240	65.692.529	98,84	
-	Pembangunan Dermaga/Tambatan kapal (DAU)	826.301.769	825.632.240	669.529	99,92	
-	Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang (DAU)	48.000.000	47.773.000	227.000	99,53	
-	Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang (DAK)	975.601.500	959.089.000	16.512.500	98,31	
-	Pembangunan Dermaga/Tambatan kapal (DAK)	1.485.148.500	1.465.425.000	19.723.500	98,67	
-	Pengadaan Kendaraan Angkutan Perintis DAK	2.318.960.000	2.290.400.000	28.560.000	98,77	
-	Pengadaan Kendaraan Angkutan Perintis DAU	6.000.000	6.000.000	0	100,00	
5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	0	0	0	
-	Penyusunan Rencana Induk Perhubungan	0	0	0	0	Perubahan, dari Rp. 30.000.000 berkurang Rp. 30.000.000

6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.490.000.000	783.982.000	706.018.000	52,62	
-	Pembangunan Gedung Terminal	1.490.000.000	783.982.000	706.018.000	52,62	Perubahan, dari Rp. 1.600.000.000 berkurang Rp. 110.000.000
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	238.200.000	236.605.000	1.595.000	99,33	
-	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	238.200.000	236.605.000	1.595.000	99,33	
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	58.000.000	55.331.000	2.669.000	95,40	
-	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	23.000.000	20.331.000	2.669.000	88,40	
-	Pekan Keselamatan Lalu Lintas	35.000.000	35.000.000	0	100,00	
9	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	635.932.000	593.890.000	42.042.000	93,39	
-	Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas (DAU)	55.662.000	51.840.000	3.822.000	93,13	
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Laut	86.700.000	86.700.000	0	100,00	Perubahan, dari Rp. 59.700.000 bertambah Rp. 27.000.000
-	Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas (DAK)	435.620.000	397.400.000	38.220.000	91,23	
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan	57.950.000	57.950.000	0	100,00	
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	257.000.000	247.555.000	9.445.000	96,32	
-	Peningkatan Penyediaan SISKOMPAD E – Government	220.000.000	218.110.000	1.890.000	99,14	
-	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	37.000.000	29.445.000	7.555.000	79,58	

11	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo	180.000.000	179.896.600	103.400	99,94	
-	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	80.000.000	79.975.000	25.000	99,97	
-	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Kominfo	100.000.000	99.921.600	78.400	99,92	Perubahan, dari Rp. 25.000.000 bertambah Rp. 75.000.000
	JUMLAH	10.904.500.240	10.043.301.934	861.198.306	92,10	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dishubkominfo

Sebagai Instansi teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Donggala yang mendapat mandat (wewenang) dalam merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis. Analisis Kinerja pada DISHUBKOMINFO dilihat dari peningkatan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan agar terpenuhinya jasa pelayanan angkutan umum yang efektif dan efisien
2. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang beroperasi dengan baik sehingga menunjang pelayanan jasa transportasi yang representatif
3. Persentase kepuasan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan sehingga meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum
4. Persentase jumlah kecelakaan lalu-lintas yang menurun menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan jasa di bidang perhubungan

5. Jumlah dokumen operasional arus lalu-lintas transportasi darat dan laut sebagai dasar perencanaan dan pengembangan data perhubungan.
6. Jumlah dokumen perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika digunakan sebagai dasar pembangunan perhubungan yang terpadu dan tepat sasaran.
7. Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika sebagai fasilitas penghubung h.masyarakat antar daerah yang cepat, dan murah.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dishubkominfo

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 37 tahun 2010 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas–tugas yang dimaksud, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai fungsi: 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai denga lingkup tugasnya; 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; 4).

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala yang diberi tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan sebagian wewenang Sub Sektor Perhubungan darat, Sub Sektor Perhubungan Laut, serta Komunikasi dan Informatika. Dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangannya harus dilaksanakan secara optimal. Sebagai pelayan masyarakat selalu siap dalam mengemban amanah tanpa mengenal ruang waktu dan tempat dimana pelayanan itu diberikan. Namun upaya optimalisasi peran dan tugas tersebut masih dihadapkan pada beberapa kendala dan dukungan sumber daya yang masih sangat terbatas antara lain dukungan sumber daya aparatur sebagaimana dapat digambarkan berikut ini :

Berdasarkan formasi yang ada sesuai struktur organisasi dan kelompok-kelompok tugas yang perlu diemban, maka jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural, fungsional, Kepala Terminal / Kepala Pos Pengawasan, Staf Administrasi Kantor,

Kepala Satuan Tugas Operasi Pengawasan / Pengendalian / Penertiban, PPNS, Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan, Pemeriksa Teknis Kendaraan pada Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Staf Administrasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Staf Administrasi Terminal / Pos Pengawasan, Petugas Pelaksana / Anggota Terminal dan Pos Pengawasan, Anggota Satgas Operasi Pengawasan / Pengendalian / Penertiban, Pengemudi, Penjaga Kantor, Petugas Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor, Pengantar Surat, Teknisi Penerangan dan Elektronik, Operator Komputer, seluruhnya berjumlah 281 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Kepala Dinas | 1 orang |
| 2. Sekretaris Dinas | 1 orang |
| 3. Kepala Bidang | 3 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | 3 orang |
| 5. Kepala Seksi | 11 orang |
| 6. Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 orang |
| 7. Kepala Terminal / Pos Pengawasan | 10 orang |
| 8. Kepala Satgas Pengawasan / Pengendalian / Penertiban Angkutan Jalan | 1 orang |
| 9. Kepala Satgas Pengawasan/ Pengendalian / Penertiban Kepelabuhanan | 1 orang |
| 10. Unsur Staf | |
| a. Staf Khusus Kadis | 2 orang |
| b. Staf Sekdis | 1 orang |
| c. Staf Kasub Bag Kepegawaian dan Umum | 8 orang PNS + 6 orang PHL |
| d. Staf Kasub Bag Keuangan dan Aset | 5 orang PNS + 4 orang PHL |
| e. Staf Kasub Bag Perencanaan dan Program | 3 orang PNS + 4 orang PHL |
| f. Operator Komputer | 10 orang |
| g. Juru Ukur Bongkar/ Muat Pelabuhan Laut | 5 orang |
| h. Anggota Satgas LLAD | 24 orang |
| i. Anggota Satgas Kepelabuhanan | 5 orang |
| j. Operator Radio Komunikasi | 2 orang |

k. Pengantar Surat	1 orang
l. Penjaga Keamanan Kantor	3 orang
m. Penjaga/ Pemelihara Kebersihan Keindahan dilingkungan Kantor/ Terminal	9 orang
n. Pengemudi	3 orang
o. Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 orang
p. Bendahara Penerimaan	1 orang
q. Bendahara Pengeluaran	1 orang
r. Bendahara Barang	1 orang
s. Bendahara Gaji	1 orang
t. Pembantu Bendahara Penerimaan	1 orang
u. Pembantu Bendahara Pengeluaran	1 orang
v. Pembantu Bendahara Barang	1 orang
w. Staf Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 orang
x. Staf Kasi Pengawasan Angkutan Jalan dan Pengendalian Operasional	2 orang
y. Staf Kasi PKB, Perbengkelan dan Pengelolaan Terminal	4 orang
z. Staf Seksi Pengembangan Sarana	1 orang
a.a. Staf Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan	2 orang
a.b. Staf Seksi Fasilitas Keselamatan Pelayaran	1 orang
a.c. Staf Seksi Pengawasan dan Pengamanan Pelabuhan	1 orang
a.d. Staf Seksi Komunikasi	1 orang
a.e. Staf Seksi Informatika	1 orang
a.f. Anggota Terminal Ogoamas	9 orang
a.g. Anggota Terminal Sioyong	7 orang
a.h. Anggota Terminal Labuan	19 orang
a.i. Anggota Terminal Banawa	10 orang
a.j. Anggota Terminal Watatu	14 orang
a.k. Anggota Pos Pengawasan Tambu	11 orang
a.l. Anggota Pos Pengawasan Wani	20 orang
a.m. Anggota Pos Pengawasan Karumba	20 orang
a.n. Anggota Pos Pengawasan Loli	18 orang

a.o. Anggota Pos Pengawasan Ganti

17 orang

Berdasarkan gambaran diatas, jelas terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketersediaan personil dengan kebutuhan personil didalam mengisi formasi / tugas-tugas yang tersedia baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pelayanan yang maksimal masih sangat terbatas. Alokasi biaya operasional dan peralatan kerja yang masih minim juga turut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas.

Selain itu juga isu-isu strategis yang berkembang pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika belum diaplikasikan secara maksimal.
- b. Belum terlaksananya pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan yang mengacu pada pelayanan satu atap yang merupakan dasar dari Good Governance.
- c. Masih rendahnya kompetensi aparatur pelaksana pengelolaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengingat satuan kerja ini merupakan satuan kerja teknis.
- d. Sarana dan Prasarana penunjang dalam pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas belum memadai sehingga potensi PAD belum maksimal dikelola.
- e. Masih kurangnya pemahaman tenaga teknis lapangan tentang pentingnya arti sebuah pelaporan pendapatan retribusi dan arus lalulintas guna meningkatkan PAD dan penataan transportasi lokal.

- f. Belum optimalnya pemanfaatan bidang laut disebabkan bidang ini belum diserahkan sepenuhnya pada daerah sedangkan wilayah kabupaten Donggala sangat berpotensi di bidang laut.
- g. Belum dioptimalkan pengendalian menara telekomunikasi yang mengarah pada PAD (retribusi pengendalian menara telekomunikasi).

Namun demikian, dengan perencanaan yang matang, melalui pertahapan program dan kegiatan secara tepat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, diharapkan dapat mengatasi setiap kendala dan keterbatasan yang ada.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dishubkominfo. Program Kegiatan yang dimasukkan dalam Rancangan Awal RKPD seluruhnya terakomodir dalam Renja Bappeda Tahun 2016.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran sebagai dimaksud di atas, perlu ditempuh dengan kebijakan-kebijakan tertentu, yaitu :

1. Menetapkan regulasi operasional yang efektif berdaya guna dan berhasil guna sebagai pedoman bagi semua pihak yang bergerak dan terkait dengan penyelenggaraan angkutan umum, komunikasi dan informatika.
2. Memberi peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mengembangkan usaha di bidang penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan umum, komunikasi dan informatika secara arif dan konsekuen.
3. Memberi peluang dan kesempatan sebesar-besarnya kepada aparatur untuk memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas dan kualitas.
4. Mengembangkan system koordinasi dan sinkronisasi antar semua elemen pemangku kepentingan mulai dari gagasan dan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Melalui penerapan koridor renja ini diharapkan dapat mengarah kepada beberapa tujuan pokok sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang representatif, akomodatif, aman, lancar dan tertib, serta efektif dan efisien.

2. Terjalinnnya keseimbangan dan kesinambungan yang harmonis dan selaras antara pengguna dan penyedia jasa angkutan umum.
3. Tersalurkannya seluruh akses komunikasi dan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
4. Tersedianya seluruh fasilitas, sarana dan prasarana pendukung utama penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan umum, komunikasi dan informatika yang memadai.
5. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal didalam pengelolaan seluruh kebijakan regulasi secara profesional dan bertanggung jawab.
6. Terselenggaranya manajemen pengelolaan sumber daya yang kapabel dan akuntabel.

3.2.2. Sasaran

Sebagai tolok ukur didalam kendali pencapaian tujuan akhir sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan adanya indikator pengantar pencapaian tujuan yang sering disebut tujuan antara dituangkan kedalam kelompok sasaran yaitu :

1. Tersusunnya rumusan program dan rencana kegiatan, regulasi, sosialisasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan penindakan terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan angkutan umum, komunikasi dan informatika berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terciptanya daya tarik bagi kalangan usahawan swasta untuk berkiprah dan berinvestasi di bidang pelayanan jasa angkutan umum, komunikasi dan informatika secara profesional.
3. Terciptanya kondisi dan suasana yang mampu mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk lebih memilih dan memanfaatkan jasa pelayanan angkutan umum,

serta mengakses informasi pembangunan dan layanan sosial lainnya melalui sarana komunikasi yang tepat, dan murah.

4. Terhimpun dan terkelolanya seluruh sumber pembiayaan dan pendapatan yang sah secara akuntabilitas.
5. Terjalinnnya simpul-simpul jaringan angkutan umum baik inter moda maupun antar moda transportasi berdasarkan dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatrolok) yang bersinergi dengan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrowil).
6. Terlaksananya sistem pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap pergerakan arus lalu lintas angkutan secara terpadu.
7. Terjalinnnya kerjasama yang saling menguntungkan antar pengusaha jaringan komunikasi dan informatika serta antara para pengelola jaringan komunikasi dan informatika dengan Pemerintah Daerah melalui instansi teknis terkait.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Peningkatan Pelayanan Angkutan
8. Peningkatan dan Pengamanan Lalu-Lintas
9. Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan/Transportasi kepulauan antar desa/pulau-pulau kecil di daerah tertinggal
10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
11. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
12. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

13. Kerjasama Informasi dan Media Massa
14. Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
2. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
3. Pembangunan gedung kantor
4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
6. Pembangunan gedung terminal
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
8. Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9. Rehabiliasi/pemeliharaan gedung terminal/pelabuhan
10. Penyusunan dokumen rencana induk perhubungan
11. Pengadaan angkutan perintis
12. Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas
13. Pengadaan pagar penagaman (gadrill) marka
14. Pengadaan lampu lalu-lintas
15. Pengadaan LPJU
16. Pengadaan Kapal Patroli Perairan
17. Pekan Keselamatan Transportasi Darat
18. Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu-Lintas Angkutan laut dan
Kepelabuhanan
19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20. Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal
21. Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang
22. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
23. Peningkatan penyediaan Siskompad E – Government
24. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kominfo
26. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
27. Penyerbarluasan informasi pembangunan daerah
28. Sistem informasi manajemen pemerintahan

TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Donggala
Dinsa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERHUBUNGAN									
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.270.370.323				2.383.888.839
-	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi	Jumlah rapat dan koordinasi yg dilaksanakan	Wilayah Indonesia	100%	270.370.323	DAU		100%	283.888.839
-	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Kantor Dishubkominfo	100%	2.000.000.000	DAU		100%	2.100.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				441.000.000				463.050.020
-	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana kantor yang dibangun	Kantor Dishubkominfo	100%	100.000.000	DAU		100%	163.050.000
-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan	Kantor Dishubkominfo	100%	250.000.000	DAU		100%	150.000.000
-	Pengadaan dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang	Kantor Dishubkominfo	100%	91.000.000	DAU		100%	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		diadakan							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				33.075.000				34.728.750
-	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase peningkatan SDM Aparatur	Wilayah Indonesia	3 Orang	33.075.000	DAU		3 Orang	34.728.750
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								-
-	Penyusunan rencana induk perhubungan (RIP)	Jumlah dokumen RIP, Audit penilaian retribusi parkir tepi jalan dan perda yang tersusun	Wilayah Kab. Donggala	100%	-	DAU		-	-
5	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan				500.000.000				500.000.000
-	Pembangunan gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun	Wilayah Kab. Donggala	1 Unit	500.000.000	DAU		100%	500.000.000
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				-				100.000.000
-	Rehabilitasi /Pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang diperbaiki	Wilayah Kab. Donggala	100%	-	DAU		-	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				150.000.000				150.000.000
-	Pekan Keselamatan lalu lintas	Jumlah sopir/pengendara yang memperoleh pembinaan	Wilayah Kab. Donggala	100%	75.000.000	DAU		100%	75.000.000
-	Koordinasi dalam pelayanan angkutan	Jumlah rapat dan koordinasi yg dilaksanakan	Wilayah Indonesia	100%	75.000.000	DAU		100%	75.000.000
8	Program Peningkatan Pengamanan Lalu Linta				570.000.000				600.000.000
-	Pengadaan Rambu-rambu Lalu-Lintas	Jumlah Rambu-rambu yang terpasang	Wilayah Kab. Donggala	7 Unit	410.000.000	DAU		100 Unit	440.000.000
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LLAJ	Jumlah tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Wilayah Kab. Donggala	1 Dok	80.000.000	DAU		1 Dok	85.000.000
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas laut	Jumlah tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Wilayah Kab. Donggala	1 Dok	80.000.000	DAU		1 Dok	85.000.000
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportasi Kepulauan antar Desa/Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Tertinggal				3.724.585.300				3.821.314.565

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Pembangunan Dermaga/Tambatan kapal	Jumlah Dermaga/Tambatan kapal yang dibangun	Wilayah Kab. Donggala	4 Unit	1.463.400.000	DAK		4 Unit	1.463.400.000
-	Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang	Jumlah Kapal Perintis yang diadakan	Wilayah Kab. Donggala	4 Unit	526.600.000	DAK		4 Unit	536.600.000
-	Pengadaan Angkutan Perintis	Jumlah Kendaraan Angkutan Perintis yang diadakan	Wilayah Kab. Donggala	4 Unit	1.734.585.300	DAK		4 Unit	1.821.314.565
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa				450.000.000				461.768.118
-	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang di bentuk	Wilayah Kab. Donggala	10 Kelompok	100.000.000	DAU		10 Kelompok	100.000.000
-	Peningkatan dan Penyediaan Siskompad E - Government	Jumlah sistem komunikasi yang terpasang	Wilayah Kab. Donggala	8 Unit	350.000.000	DAU		8 Unit	361.768.118
11	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi				-				-
-	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah data kajian/penelitian bidang kominfo yang di susun	Wilayah Kab. Donggala	1 Dokumen	-	DAU		-	-
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kominfo	Jumlah tersusunnya dokumen hasil	Wilayah Indonesia	1 Dokumen	-	DAU		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		monitoring dan evaluasi							
12	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo				75.000.000				100.000.000
-	Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	Jumlah SDM bidang kominfo yang di bina	Wilayah Indonesia	6 Orang	75.000.000	DAU		6 Orang	100.000.000
13	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				125.000.000				125.000.000
-	Penyerbarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah media massa yang menyebarkan informasi pembangunan daerah	Wilayah Indonesia	5 Mas Media	125.000.000	DAU		5 Mas Media	125.000.000
14	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi				551.250.000				578.812.500
-	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan	Jumlah jaringan Komunikasi yg di bangun	Wilayah Kab. Donggala	4 Unit	551.250.000	DAU		4 Unit	578.812.500
J U M L A H					8.890.280.623				9.565.562.772

BAB IV**PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Donggala telah melaksanakan tugasnya dan berupaya secara maksimal dimana Program/Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran dapat terlaksana dengan baik, maka kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran khususnya untuk tahun kerja 2015, perlu pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia, berupa anggaran, personil, peralatan, kewenangan, serta ruang dan waktu secara efektif dan efisien.
2. Pada bidang pelayanan dan percepatan administrasi perkantoran dengan kelompok sasaran masyarakat pengguna jasa perizinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur terdapat dua program dan tiga kegiatan yang mendukung upaya tersebut. Indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan adalah terselenggaranya administrasi dengan baik, kemudahan dan standar pelayanan perizinan tepat waktu serta meningkatnya sumber daya aparatur i dalam melaksanakan kegiatan.penyedia jasa transportasi terdapat lima program dan sembilan kegiatan dala bentuk penyediaan alat transportasi umum pada daerah-daerah terpencil (angkutan perintis) dan pembangunan dermaga/tambatan kapal, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan (pos dan terminal) serta monitoring serta pengawasan terhadap arus transportasi barang dan orang. Selain itu upaya

pengembangan jaringan informasi antara dua wilayah Kabupaten Donggala yang terpisah tengah diupayakan dengan pengadaan repeater untuk komunikasi.

3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja dan kegiatan terkait lainnya.
4. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka perlu penetapan sasaran dan kegiatan menurut skala prioritas.
5. Perlu pengembangan administrasi dan manajemen secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Namun dibalik keberhasilan terdapat hambatan dan tantangan dalam mewujudkan keberhasilan-keberhasilan tersebut yaitu masih belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aparat, khususnya dalam hal pembinaan dan pemberian sanksi-sanksi sehingga masih terdapat sebagian aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala yang belum dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara disiplin.

Oleh karena itu diharapkan kedepan agar dapat tercapai hasil yang optimal maka diperlukan aparat yang mampu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.